

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Association of Southeast Asian Nations atau yang akrab disebut dengan istilah ASEAN, merupakan organisasi ekonomi dan geopolitik khusus untuk negara-negara di wilayah Asia Tenggara (Narine, 2008). Adapun negara-negara yang tergabung di dalam ASEAN yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar dan Kamboja. Timor Leste sendiri status keanggotaan di ASEAN masih dipertangguhkan karena menimbang beberapa faktor seperti kapasitas administrasi, politik, dan ekonomi yang memadai untuk memenuhi kewajiban sebagai anggota ASEAN. Dengan bergabungnya negara-negara tersebut menjadi anggota dari ASEAN, maka diharapkan dapat terjalinnya kerja sama yang baik antar tiap negara dan dapat memicu masing-masing negara menuju keadaan perekonomian yang lebih baik.

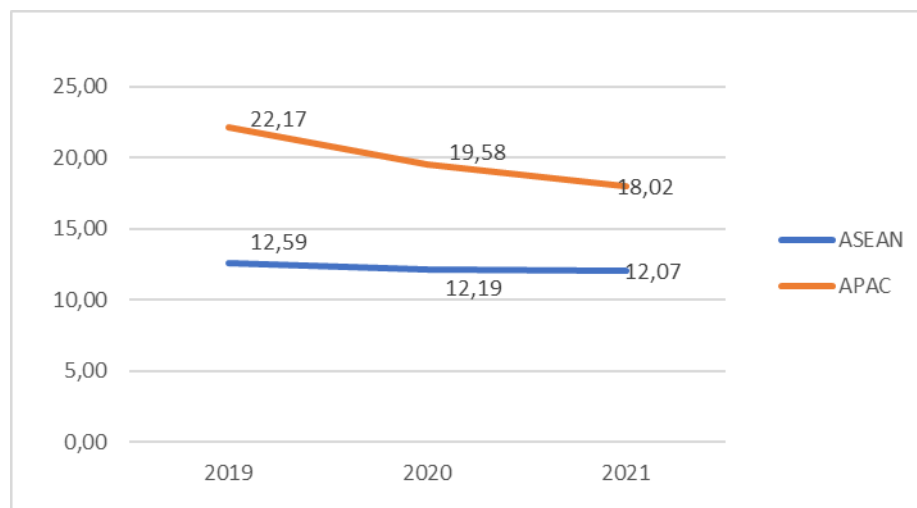
Negara-negara ASEAN memiliki kondisi ekonomi yang beragam, dengan karakteristik dan tingkat perkembangan yang berbeda-beda, namun saling terhubung melalui integrasi regional yang semakin kuat. Tantangan isu geopolitik serta berlanjutnya pengetatan moneter untuk mengendalikan tekanan inflasi global, ekonomi ASEAN tetap tumbuh meskipun melambat dalam lima tahun terakhir, contohnya saat pandemi Covid-19 ekonomi negara-negara ASEAN tetap tumbuh mencapai 5,7% yoy (Riatu, 2022). Faktor pendorong kinerja ekonomi ASEAN utamanya adalah konsumsi masyarakat yang sudah pulih dan melonjak setelah terkendalinya penanganan pandemi di masing-masing negara selain itu kerjasama

dan saling membantu antar negara di ASEAN juga terjalin dengan baik saat Pandemi Covid-19.

Kontribusi *tax ratio* terhadap perekonomian di ASEAN memainkan peran penting dalam mendukung pembangunan ekonomi dan keberlanjutan fiskal. Tax ratio, yang mencerminkan persentase pendapatan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), menjadi indikator utama untuk menilai kapasitas suatu negara dalam mengumpulkan pendapatan guna mendanai pengeluaran publik. Peningkatan *tax ratio* di ASEAN berkontribusi langsung terhadap penguatan anggaran negara, yang kemudian dialokasikan untuk sektor-sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur (Ky & Lim, 2023). Peningkatan *tax ratio*, negara-negara ASEAN dapat mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri, meningkatkan kepercayaan investor, dan menciptakan stabilitas ekonomi yang lebih baik.

Permasalahan penting yang berkaitan dengan pajak di ASEAN yaitu Rasio pajak untuk negara-negara di ASEAN relatif rendah dibandingkan dengan rata-rata negara berpendapatan menengah atau *middle-income countries* dan jauh dibawah negara-negara *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD). Untuk kawasan ASEAN, rasio pajak negara-negara di ASEAN relatif masih dibawah rata-rata rasio pajak untuk Asia Pasifik yang sekitar 19,8% di tahun 2021 (Riatu, 2022). Hal ini menunjukkan kawasan ASEAN secara relatif merupakan *low-tax jurisdiction* dan memiliki permasalahan pelanggaran penggelapan pajak secara ilegal atau bisa disebut *tax evasion* yang relatif masih besar, dan kemungkinan berimplikasi pada rendahnya pemungutan pajak.

Hal ini juga diperparah dengan kondisi defisit fiskal terhadap tax ratio. Kondisi fiskal Singapura mengalami penurunan yang signifikan, mencatat defisit sebesar 10,7% dari Produk Domestik Bruto (PDB), setelah sebelumnya mengalami surplus sebesar 0,2% pada tahun 2019. Seiring dengan pemulihan ekonomi, defisit fiskal tersebut menunjukkan penurunan yang progresif, mendekati angka pra-pandemi. Pada tahun 2022, defisit fiskal Singapura tercatat sekitar 0,2% dari PDB. Sementara itu, Indonesia mengalami defisit fiskal sebesar 2,4% dari PDB pada tahun 2022, setelah mengalami kontraksi yang mencapai 6,1% pada tahun 2020. Dalam periode yang sama, defisit fiskal Thailand juga menunjukkan perbaikan, dari 4,1% menjadi 3,8% (Riatu, 2022). Peningkatan ini mencerminkan pemulihan ekonomi yang sedang berlangsung serta efektivitas intervensi pemerintah dalam mendukung proses pemulihan pasca pandemi.V



Sumber : World Bank, data diolah

Gambar 1. 1 Perbandingan *Tax Ratio* ASEAN dan Asia Pasifik Tahun 2019-2021 (Persen)

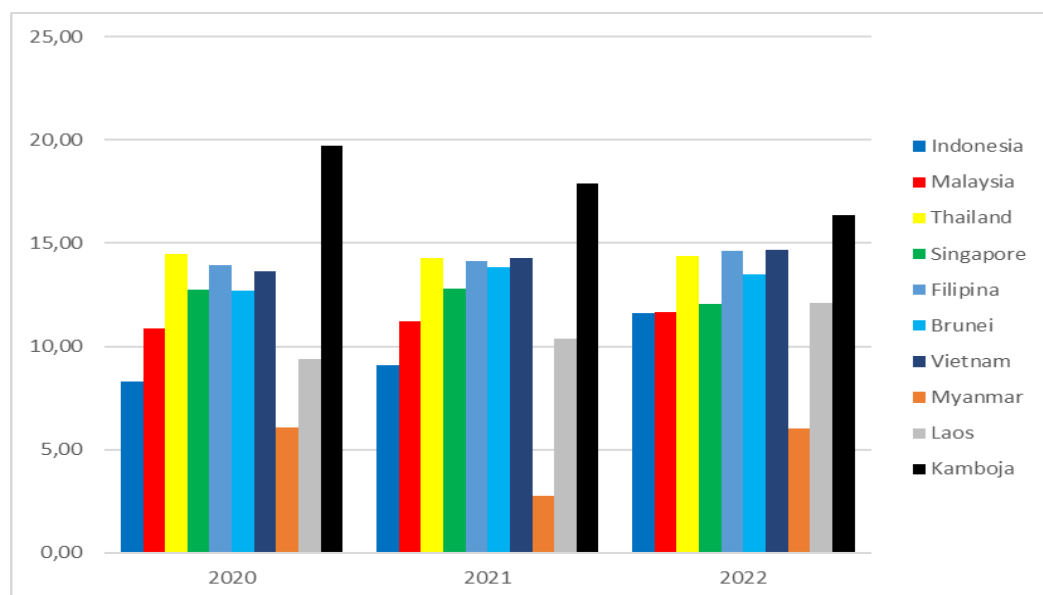
Gambar 1.1 merupakan perbandingan rasio *tax ratio* antara ASEAN dan wilayah Asia Pasifik (APAC) selama periode 2019 hingga 2021. *Tax ratio* APAC secara konsisten lebih tinggi dibandingkan dengan ASEAN dalam tiga tahun tersebut. Pada tahun 2019, APAC mencatat rasio sebesar 22,17%, jauh melampaui ASEAN yang hanya sebesar 12,59%. Namun, meskipun demikian, terjadi tren penurunan rasio *tax ratio*.

Penurunan yang lebih signifikan terjadi di APAC, dimana *tax ratio* turun dari 22,17% pada tahun 2019 menjadi 19,58% pada tahun 2020, dan kemudian menjadi 18,02% pada tahun 2021. Sementara itu, ASEAN mengalami penurunan yang lebih lambat dalam rasio *tax ratio*-nya. Dari 12,59% pada tahun 2019, rasio ini turun menjadi 12,19% pada tahun 2020, dan kemudian sedikit menurun lagi menjadi 12,07% pada tahun 2021. Secara keseluruhan APAC memiliki rasio yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan ASEAN sepanjang tahun 2019-2021.

Penurunan *tax ratio* di kedua wilayah mungkin dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi global, seperti perlambatan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Penelitian oleh (McKibbin & Fernando, 2023) menyatakan bahwa krisis ekonomi global cenderung menurunkan *tax ratio* di berbagai negara, khususnya di kawasan yang lebih bergantung pada perdagangan internasional dan ekspor. Hal ini relevan dengan penurunan yang lebih besar di kawasan APAC, yang banyak bergantung pada rantai pasokan global. Sejumlah negara di kawasan APAC telah melakukan reformasi perpajakan dengan tujuan meningkatkan tingkat kepatuhan serta memperluas basis pajak. Penelitian yang dilakukan oleh (Bird & Zolt, 2008)

menekankan pentingnya reformasi pajak yang menyeluruh untuk mendorong tax ratio, terutama di negara-negara berkembang.

Berbicara terkait kebijakan fiskal tidak lepas dari pajak. Pajak menurut (World Bank, 2015) adalah merupakan transfer wajib ke pemerintah pusat yang digunakan untuk kepentingan publik dan salah satu sumber pendanaan yang digunakan oleh pemerintah pusat dalam menjalankan kegiatan pemerintahan dan untuk kepentingan publik. Pertemuan para Menteri Keuangan ASEAN pada April 2019, menginisiasi pembentukan *ASEAN Tax Forum*. Tujuan dibentuknya ASEAN Tax Forum yaitu untuk memperkuat kerjasama dalam bidang perpajakan, menghindari terjadinya pajak berganda, dan membangun komunitas pajak ASEAN yang lebih kompetitif (Suska, 2019). Dengan sistem perpajakan yang selaras antar negara ASEAN, maka ASEAN sebagai suatu komunitas ekonomi dapat menjadi kawasan yang mampu bersaing dengan kawasan ekonomi lainnya.



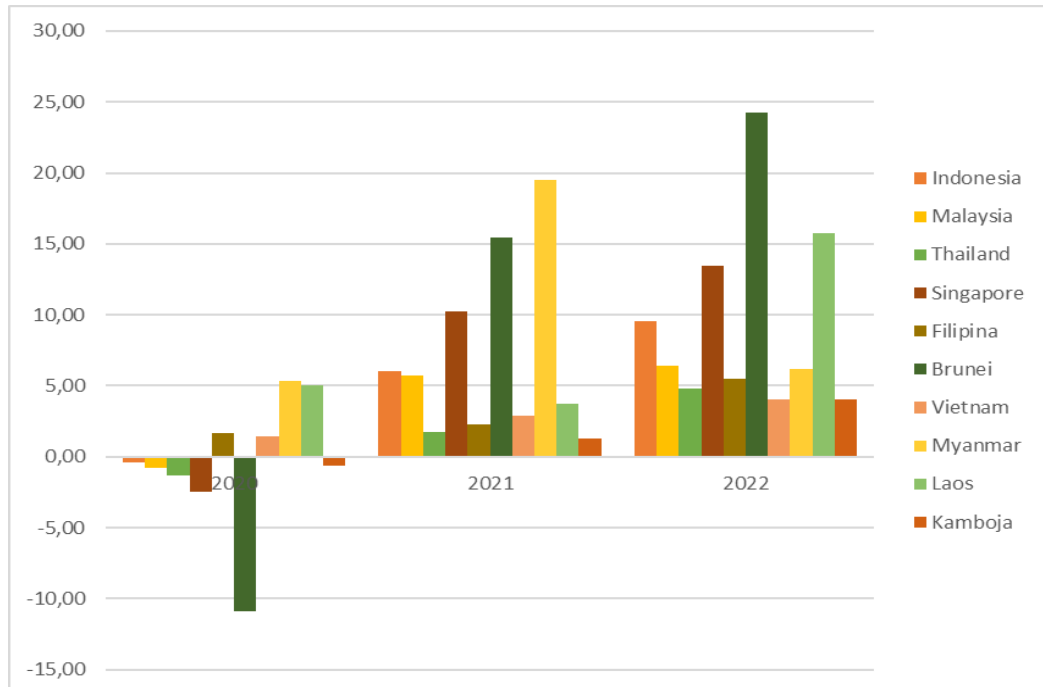
Sumber : World Bank, data diolah

Gambar 1. 2 Rasio Tax Ratio di ASEAN 2020-2022 (% GDP)

Pada gambar tersebut menunjukkan tren *tax ratio* dari berbagai negara di ASEAN selama periode 2020 hingga 2022. Grafik diatas menunjukkan fluktuasi antar negara. Di Indonesia, *tax ratio* tetap stabil di kisaran 10-11%, mencerminkan konsistensi dalam kebijakan fiskal meskipun ada tantangan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Malaysia dan Thailand menunjukkan sedikit fluktuasi, dengan penurunan moderat pada tahun 2021 yang kemudian diikuti dengan kenaikan pada tahun 2022. Hal ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh dampak ekonomi dari pandemi. Di sisi lain, Singapura, Filipina, dan Vietnam memiliki *tax ratio* yang lebih tinggi, stabil di atas 13%, yang mengindikasikan efektivitas sistem perpajakan mereka dalam mendukung pendapatan negara. Brunei dan Laos memiliki *tax ratio* rendah, dengan Brunei stabil sekitar 8% dan Laos sedikit meningkat pada 2022 namun tetap di bawah 7%, menunjukkan ketergantungan rendah pada pajak. Myanmar, dengan *tax ratio* sekitar 5%, mengalami fluktuasi minimal, yang mungkin dipengaruhi oleh ketidakstabilan politik. Sebaliknya, Kamboja menunjukkan angka tinggi di atas 20% selama tiga tahun, mencerminkan kebijakan fiskal agresif. Secara keseluruhan, meskipun sebagian besar negara ASEAN stabil, terdapat perbedaan signifikan dalam kebijakan dan kemampuan pengumpulan pajak antar negara.

Indikator makro ekonomi yang berpengaruh terhadap pajak meliputi inflasi, ekspor, dan investasi asing langsung (FDI) (Edgar, 2014). (Mankiw, 2003) mengatakan bahwa inflasi dapat mempengaruhi *tax ratio* dengan cara mengurangi daya beli dan konsumsi, yang berdampak pada pajak secara tidak langsung.

Penelitian yang dilakukan (Ky & Lim, 2023) di *Association of Southeast Asian Nations* hasilnya menunjukkan bahwa pajak berpengaruh terhadap inflasi, karena pajak digunakan untuk pengendalian inflasi, akan tetapi penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian (Tricahyono & Wijaya, 2024) yang mengatakan pajak tidak berpengaruh terhadap inflasi. Faktor kedua yang mempengaruhi pajak yaitu ekspor, menurut (Davoodi, 1997) ekspor yang tinggi meningkatkan tax ratio. *Foreign Direct Investment* berkontribusi melalui perluasan kegiatan ekonomi dan peningkatan pajak perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh (Andrejovská & Puliková, 2019) mengatakan bahwa FDI juga berkontribusi terhadap *tax ratio* melalui pajak perusahaan, royalti, dan pajak atas keuntungan yang diperoleh dari investasi asing tersebut.



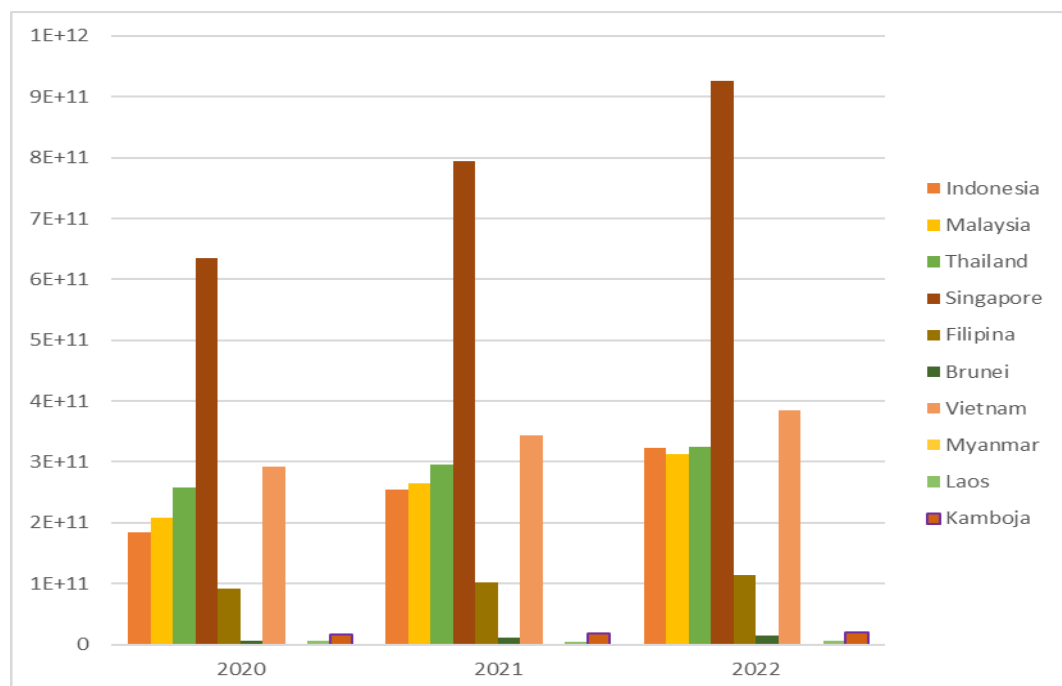
Sumber : World Bank, data diolah

Gambar 1. 3 Inflasi di Negara ASEAN 2020-2022 (Persen)

Faktor pertama yang mempengaruhi pajak yaitu inflasi (Mankiw, 2003). Inflasi merupakan kenaikan harga secara terus menerus dalam kurun waktu tertentu. Pada gambar 1.3 menunjukkan fluktuasi inflasi di negara-negara ASEAN. Indonesia mengalami penurunan tajam pada 2020, kemudian meningkat pada 2021 dan sedikit menurun di 2022. Malaysia mengikuti pola serupa, dengan inflasi rendah di 2020, meningkat pada 2021 dan tetap tinggi di atas 3% pada 2022. Thailand mengalami kenaikan inflasi yang signifikan pada tahun 2022 setelah sebelumnya terjaga rendah pada 2020 dan 2021. Peningkatan ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh gangguan rantai pasokan serta naiknya harga barang-barang pokok. Singapura, meskipun mencatat inflasi yang relatif rendah, juga mengalami sedikit peningkatan pada 2022, mencapai 2-3%, seiring dengan pemulihan ekonomi pasca-pandemi. Brunei menunjukkan inflasi yang stabil dan rendah, sedangkan Vietnam mengalami lonjakan pada 2022. Myanmar mencatat inflasi sangat tinggi, akibat ketidakstabilan politik, sementara Laos mengalami peningkatan moderat. Kamboja mempertahankan inflasi rendah dengan sedikit kenaikan pada 2022. Secara keseluruhan, inflasi di ASEAN rendah pada 2020 dan 2021, namun meningkat signifikan pada 2022 karena pemulihan ekonomi dan gangguan pasar global.

Faktor kedua yang mempengaruhi pajak yaitu ekspor. Ekspor adalah kegiatan yang melibatkan penjualan barang atau jasa dari satu negara ke negara lain. Secara sederhana, ekspor dapat dipahami sebagai proses menjual produk yang dihasilkan dalam negeri ke pasar internasional. Kegiatan ini biasanya dilakukan oleh individu atau badan hukum yang disebut eksportir. Proses ekspor melibatkan beberapa langkah, termasuk pengawasan oleh pihak berwenang seperti Bea Cukai

untuk memastikan bahwa semua prosedur dan regulasi dipatuhi. Hubungan antara ekspor dan pajak sangat penting dalam konteks perekonomian suatu negara, termasuk Indonesia. Pajak yang dikenakan pada kegiatan ekspor dapat mempengaruhi volume ekspor, pendapatan negara, dan daya saing produk di pasar internasional (Silitonga, 2021).



Sumber : World Bank, data diolah

Gambar 1. 4 Ekspor di Negara-Negara ASEAN 2020-2022 (Milyar USD)

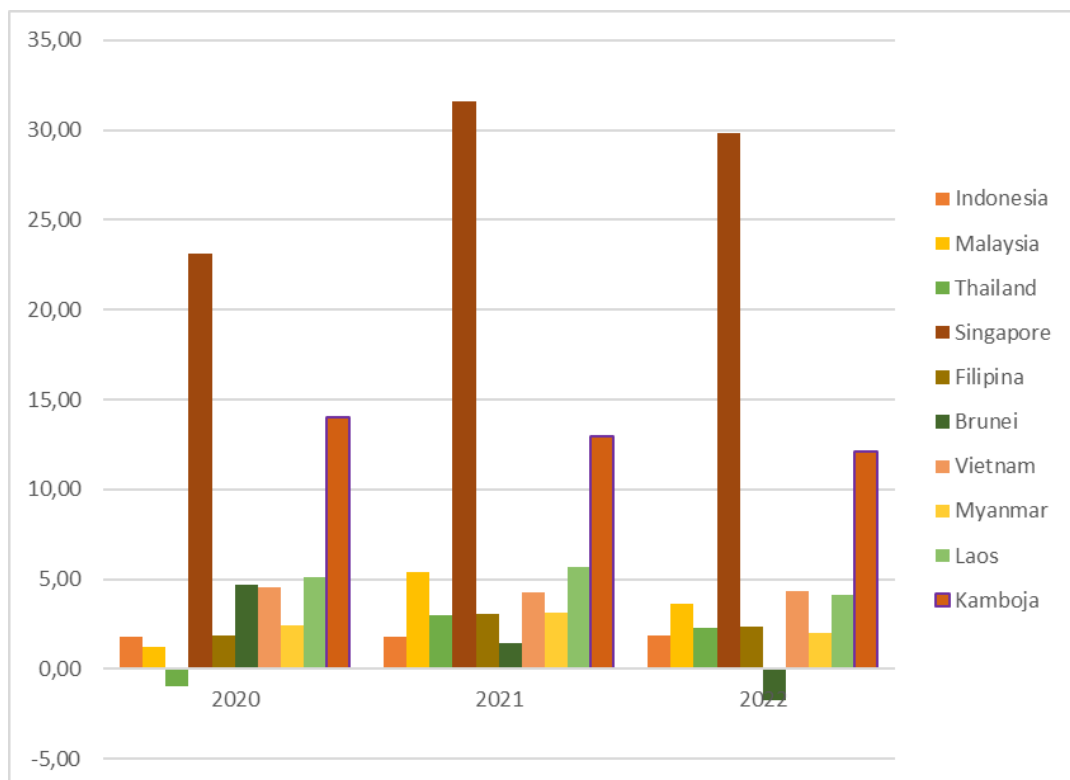
Gambar 1.4 menunjukkan ekspor di negara negara ASEAN. Singapura mencatatkan nilai ekspor tertinggi di ASEAN, yakni sekitar 650 miliar USD pada tahun 2020, dan mencapai 900 miliar USD pada 2022. Hal ini dimungkinkan oleh posisinya sebagai pusat perdagangan global dengan infrastruktur pelabuhan yang sangat modern serta keberagaman sektor industrinya, termasuk elektronik, bahan kimia, dan produk olahan minyak. Sementara itu, Malaysia dan Indonesia juga

menunjukkan performa ekspor yang tinggi, masing-masing mencatat sekitar 200 miliar USD dan 180 miliar USD pada 2020, hingga menyentuh 400 miliar USD dan 380 miliar USD pada 2022. Kenaikan ini didorong oleh tingginya permintaan global terhadap komoditas unggulan seperti minyak kelapa sawit, batu bara, dan minyak bumi. Thailand menunjukkan ekspor sebesar 220 miliar USD pada 2020, naik menjadi 280 miliar USD pada 2021, dan 300 miliar USD pada 2022, berkat kontribusi dari sektor otomotif dan elektronik.

Sebaliknya, negara-negara dengan nilai ekspor kecil, seperti Laos, Kamboja, dan Myanmar, memiliki kontribusi ekspor rata-rata di bawah 50 miliar USD selama periode tersebut. Kamboja mencatat ekspor sekitar 15 miliar USD pada 2020, meningkat menjadi 18 miliar USD pada 2021, dan 20 miliar USD pada 2022, didorong oleh sektor tekstil dan pakaian jadi. Brunei, meskipun memiliki nilai ekspor stabil sebesar 10 miliar USD pada 2020, meningkat menjadi 12 miliar USD pada 2021 dan 15 miliar USD pada 2022, tetap terhambat oleh ketergantungan pada gas alam cair. Hal ini disebabkan memiliki infrastruktur perdagangan yang terbatas, basis ekonomi yang kurang diversifikasi, dan ketergantungan tinggi pada produk bernilai tambah rendah.

Peningkatan ekspor di berbagai negara ASEAN ini juga berdampak signifikan terhadap *tax ratio* negara di ASEAN. Ekspor yang lebih tinggi biasanya terkait dengan peningkatan aktivitas ekonomi, yang pada akhirnya meningkatkan *tax ratio*, baik dari pajak penghasilan perusahaan yang terlibat dalam perdagangan internasional maupun dari pajak pertambahan nilai (PPN) yang dikenakan pada barang-barang yang diperdagangkan. Sebagai contoh, Thailand dan Malaysia telah

melaporkan bahwa peningkatan ekspor mereka telah membantu menstabilkan basis pajak nasional, sebagaimana dinyatakan dalam laporan tahunan mereka (IMF, 2021).



Sumber : World Bank, data diolah

Gambar 1. 5 Foreign Direct Investment di Negara-Negara ASEAN 2018-2022 (% GDP)

Faktor ketiga yang mempengaruhi pajak yaitu *Foreign Direct Investment* atau FDI. Gambar 1.5 menunjukkan negara Singapura tetap menjadi penerima FDI terbesar di kawasan ASEAN, dengan kontribusi FDI terhadap GDP sekitar 30% pada 2020, meskipun mengalami penurunan menjadi 25% pada 2021 dan sedikit pulih menjadi 28% pada 2022. Penurunan pada 2021 dipengaruhi oleh ketidakpastian ekonomi global akibat pandemi, tetapi Singapura tetap menjadi

pusat keuangan yang sangat menarik berkat kebijakan pro-bisnis, stabilitas politik, dan infrastruktur yang maju. Negara Kamboja juga memiliki FDI tinggi, berkisar antara 12% sampai paling tingginya yaitu 14,01% di tahun 2020. Selama dua dekade terakhir, arus masuk investasi langsung asing (FDI) ke Kamboja telah meningkat secara signifikan karena undang-undang investasinya yang liberal dan liberalisasi sektor jasa, termasuk sektor logistik (Julia & Tania, 2020). Pada 2020, Indonesia mencatat kontribusi FDI terhadap GDP sekitar 3-4%, yang meningkat menjadi 4-5% pada 2021 berkat reformasi kebijakan seperti Undang-Undang Cipta Kerja. Namun, pada 2022, kontribusi FDI kembali turun menjadi 3-4% akibat tantangan ekonomi pasca-pandemi. Vietnam menunjukkan kontribusi yang stabil antara 5-7% selama periode tersebut, didorong oleh sektor manufaktur dan teknologi. Malaysia dan Thailand mencatat kontribusi lebih rendah, sekitar 2-3% pada 2020, dengan sedikit peningkatan pada 2021, meskipun terbatas oleh ketidakpastian politik di Thailand dan ketergantungan sektor tertentu di Malaysia. Sementara itu, Brunei, Laos, Myanmar, dan Kamboja memiliki kontribusi FDI yang sangat kecil, umumnya di bawah 2%, dipengaruhi oleh ketergantungan pada sektor terbatas seperti energi dan pertanian.

Pengaruh positif FDI terhadap pendapatan pajak dapat diwujudkan dalam beberapa cara seperti yang dijelaskan oleh (Bond & Samuelson, 1986) dengan mengkalibrasi model teoritis pada dua periode tentang hubungan antara FDI dan pendapatan pajak. Temuan mereka adalah dalam pendapatan pajak pemerintah negara awal dapat menurun dalam jangka pendek karena pembebasan pajak *tax holiday* sebagai alat penarik FDI di periode awal. Namun, negara tersebut dapat

meningkatkan pendapatan pajak dalam jangka panjang karena investasi asing tidak akan ditarik setelah periode tax holiday. FDI juga dapat mempengaruhi *tax ratio* melalui efek kesejahteraan.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, secara garis besar *tax ratio* merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan ekonomi di negara-negara ASEAN. Faktor fundamental makro ekonomi yaitu inflasi, FDI dan ekspor diharapkan bisa stabil dengan adanya pajak. Variabel yang baru dalam penelitian ini *research gap*, yaitu variabel ekspor yang sebelumnya belum pernah diteliti terhadap kontribusi dalam peningkatan *tax ratio*. Selain itu juga, fokus penelitian di negara-negara ASEAN terkait variabel inflasi, FDI dan pengangguran belum pernah diteliti pengaruhnya terhadap *tax ratio*. Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Inflasi, Ekspor dan *Foreign Direct Investment* terhadap *Tax Ratio* di Negara-Negara ASEAN tahun 2018-2022.”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana elastisitas *tax ratio* terhadap inflasi, ekspor dan *foreign direct investment* di Negara-Negara ASEAN tahun 2018-2022?
2. Bagaimana pengaruh inflasi, ekspor dan *foreign direct investment* secara parsial terhadap *tax ratio* di Negara-Negara ASEAN tahun 2018-2022?
3. Bagaimana pengaruh inflasi, ekspor dan *foreign direct investment* secara bersama-sama terhadap *tax ratio* di negara-negara ASEAN tahun 2018-2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan, tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui elastisitas *tax ratio* terhadap inflasi, ekspor dan *foreign direct investment* di Negara-Negara ASEAN tahun 2018-2022?
2. Untuk mengetahui pengaruh inflasi, ekspor dan *foreign direct investment* secara parsial terhadap *tax ratio* di negara-negara ASEAN tahun 2018-2022?
3. Untuk mengetahui pengaruh inflasi, ekspor dan *foreign direct investment* secara bersama-sama terhadap *tax ratio* di negara-negara ASEAN tahun 2018-2022?

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung bagi berbagai pihak, di antaranya:

1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu

Dengan ditelitinya variabel inflasi, *foreign direct investment* dan ekspor terhadap *tax ratio* di negara negara ASEAN diharapkan menjadi unsur kebaruan dan pengembangan dari penelitian sebelumnya. Diharapkan pula dapat digunakan sebagai referensi atau acuan untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

1.4.2 Kegunaan Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan baik secara teoritis maupun empiris bagaimana pengaruh inflasi, ekspor dan *foreign*

direct investment terhadap *tax ratio* di negara-negara ASEAN tahun 2018-2022?

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam membuat kebijakan atau pengambilan keputusan yang berkaitan dengan *tax ratio* di negara-negara ASEAN.

c. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.

1.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di negara-negara ASEAN yang meliputi 10 negara yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei, Vietnam, Myanmar, Laos, Kamboja. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder yang didapatkan melalui *website World Bank*.

